

**STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN EDDY K.A. BERUTU DAN JIMMY  
SIHOMBING DALAM PILKADA SERENTAK 2018 DI KABUPATEN DAIRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas  
dan Melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S-1)**

**Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam**

**OLEH:**

**IKHSAN FAISAL ANGKAT  
NIM. 44144001**

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN EDDY KA BERUTU DAN JIMMY SIHOMBING DALAM PILKADA SERENTAK 2018 DI KABUPATEN DAIRI” an. IKHSAN FAISAL ANGKAT NIM : 44.14.4.001 Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal Oktober 2018

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, Oktober 2018

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH  
SKRIPSI PROGRAM SARJANA (S.1) FAK.  
USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UIN  
SUMATERA UTARA MEDAN

Ketua

Sekretaris

( )

( )

Anggota

1. ( )

2. ( )

3. ( )

4. ( )

Mengetahui :  
Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 19903 2 003

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikhsan Faisal Angkat  
NIM : 44.14.4.001  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Tempat/Tgl.Lahir : Sidikalang, 19 Januari 1996  
Pekerjaan :Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
UINSU Medan  
Alamat : Jl. Perhubungan Laut Dendang, Gg. Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN EDDY KA BERUTU DAN JIMMY SIHOMBING DALAM PILKADA SERENTAK 2018 DI KABUPATEN DAIRI”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

**Medan, Oktober 2018**

**Yang membuat pernyataan**

**IKHSAN FAISAL ANGKAT**

**NIM. 44.14.4.001**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN EDDY KA BERUTU DAN JIMMY  
SIHOMBING DALAM PILKADA SERENTAK 2018 DI KABUPATEN DAIRI**

Oleh :

**IKHSAN FAISAL ANGKAT**

NIM: 44.14.4.001

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi

Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN

Sumatera Utara Medan

Medan, Oktober 2018

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

DR. Armin Nasution, MA  
NIP. 195612171991031001

Dra. Elly Warnisyah, M.Ag  
NIP. 196703202007012026

## SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ikhsan Faisal Angkat

Nim : 44.14.4.001

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : **STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN EDDY KA  
BERUTU DAN JIMMY SIHOMBING DALAM PILKADA SERENTAK  
2018 DI KABUPATEN DAIRI**

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di**Munaqasahkan**.

Medan, Oktober 2018

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**DR. Armin Nasution, MA**

**Dra. Elly Warnisyah, M.Ag**

**NIP.195612171991031003**

**NIP.196703202007012026**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Ikhsan Faisal Angkat
2. NIM : 44.14.4.001
3. Jurusan : Pemikiran Politik Islam
4. Tmpt/Tgl.Lahir : Sidikalang, 19 Januari 1996
5. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan
6. Alamat : Jl. Perhubungan Laut Dendang.

### **II. JENJANG PENDIDIKAN**

1. SD NEGERI 034779 SIDIANGKAT : Tahun 2002
2. SMP NEGERI 3 SIDIKALANG : Tahun 2008
3. SMK NEGERI 1 SIDIKALANG : Tahun 2011
4. Mahasiswa FUSI : Tahun 2014

### **III. PRESTASI**

1. Pengurus HMJ Pemikiran Politik Islam 2015-2016
2. Pengurus PMII Komisariat FUSI UIN SU 2016-2017
3. Ketua Senat Mahasiswa FUSI UIN SU 2018
4. Sekretaris KPU UIN SU 2018



Nama : Ikhsan Faisal Angkat  
Nim : 44.14.4.001  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Judul Skripsi : **Strategi Pemenangan Pasangan Eddy K.A. Berutu dan Jimmy Sihombing dalam Pilkada Serentak 2018 di Kab. Dairi**

## ABSTRAK

Pemilukada adalah salah satu pesta demokrasi yang ada di Indonesia, Pemilukada langsung (dan serentak) juga merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal dan bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengtheing democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Strategi Pilkada yaitu cara dan metodologi yang dilakukan kandidat dalam pilkada, baik pada sapek internal atau yang dikenal dengan tim pemenangan kandidat, serta aspek eksternal, yaitu tim sukses yang dibentuk partai politik. Dalam pemilukada penyusunan dan pelaksanaan strategi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pemilukada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan pasangan Eddy K.A Berutu dan Jimmy Sihombing dalam pilkada serentak 2018 di kab. Dairi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*field research*" yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat dengan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh pasangan Eddy K.A Berutu dan Jimmy Sihombing dalam pilkada serentak 2018 di kabupaten Dairi yang pertama dilakukan adalah survey lapangan, melihat kondisi lapangan yang terjadi, mencari tahu kelemahan dan kekuatan lawan serta peluang yang bisa di manfaatkan. Kedua mengembangkan isu-isu yang ada, mengangkat kelemahan lawan. Ketiga pendekatan kepada masyarakat dengan terjun langsung, bertatap muka dengan masyarakat, sehingga benar benar memahami yang menjadi keinginan masyarakat. Keempat menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang baik antar tim dan menjaga kesolidan tim.

Namun dalam semua strategi yang dilakukan tidak lepas dari pemilihan strategi dan penyusunan serta pelaksanaan yang tepat dan baik sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Teori yang digunakan dengan strategi yang dilakukan oleh pasangan Eddy K.A Berutu dan Jimmy Sihombing, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan kesesuaian.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, segala puji bagi dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya yang diharapkan. Shalawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau yaumul akhir kelak. Amiin.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Adapun judul skripsi adalah “**Strategi Pemenangan Pasangan Eddy K.A. Berutu dan Jimmy Sihombing Dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Dairi.**”

Sebagaimana layaknya manusia, tidak pernah luput dari seperangkat kelemahan dan kekurangannya. Demikian juga halnya penulis skripsi ini. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyaknya kesulitan yang dihadapi, namun berkat Rahmat Allah SWT, dukungan, pengarahan, serta bimbingan dari beberapa pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Hamjah Angkat dan Ibu Jamilah Simarmata tak lupa anakmu berterima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Mamak yang telah memberikan



dukungan moral maupun material, memberi kasih sayang dan pengorbanan tanpa pamrih kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan Ayah dan Mamak. Amiin.

2. Bapak Rektor UIN Sumatera Utara yaitu Kh .Prof. Dr. Saidurahman. M.Ag atau Pembantu Rektor I, II, III yang selalu membangkitkan semangat-semangat mahasiswa UIN Sumatera Utara yang lebih Juara.
3. Bapak DR. Armin Nasution, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Elly Warnisyah, M.Ag selaku pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof.Dr.H. Katimin.M.Ag selaku Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, Bapak/Ibu Pembantu Dekan I, II, III, para Dosen dan seluruh karyawan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Muhammad Aswin, M.Ap selaku ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Hidayat, MA selaku sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara.
8. Bapak Bupati Dairi yang telah memberikan izin tempat dan waktu dalam pemberian data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Untuk adik adik saya yaitu Putri Wahyuni Angkat dan Rohmo Frija Firmansyah Angkat yang selalu menasihati penulis dan memberi semangat.

10. Untuk 4 Sahabat serangkai seperjuangan saya yaitu Heriyanti, Ketua IPPNU SUMUT yang sudah duluan wisuda S1. Untuk Rizqan Arief demisioner Wakil Ketua Senat Mahasiswa FUSI 2017, Riski Arif Winanda, Ketua HMJ PPI tertamvan 2017 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan S1 dengan Program Studi yang sama, dan sahabat saya Fachri Pradana, Ketua Senat Mahasiswa UIN SU 2018 semoga segera menyusul dengan kami wisuda.
11. Untuk Ketua Rayon PMII Ushuluddin dan Studi Islam sahabat Febri Ikhsanul Siregar beserta jajarannya dan seluruh keluarga besar Warga dan Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ushuluddin dan Studi Islam yang telah memberikan dukungan dan nasihatnya, semoga yang kalian harapkan dapat penulis wujudkan.
12. Dan yang terakhir untuk KRU UIN SU TERTAWA yang telah memberikan support dan dukungan kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan karya ilmiah ini yang jauh dari kesempurnaan, dan penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada pembaca. Aaamiiin ya Robb....

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

**Ikhsan Faisal Angkat**  
**NIM. 44.14.4.001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.. .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II : PILKADA DAN STRATEGI KANDIDAT</b>	
A. Pemilihan Kepala Daerah	
1. Pengertian Pilkada .....	21
2. Landasan Hukum Pilkada .....	24
3. Sejarah Pelaksanaan Pilkada Serentak.....	27
B. Strategi Kandidat	
1. Pengertian Kandidat .....	31
2. Pengertian Strategi Kandidat .....	31
3. Tujuan Strategi Kandidat.....	37
<b>BAB III : GAMBARAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2018 DI</b>	
<b>KABUPATEN DAIRI</b>	

A. Gambaran Umum Kabupaten Dairi	
1. Sejarah Kabupaten Dairi.....	39
2. Kondisi Geografis, Fisik, dan Administratif .....	40
a. Kondisi Geografis.....	40
b. Kondisi Fisik.....	40
c. Kondisi Administratif.....	41
3. Kondisi Demografi.....	41
4. Kondisi Keuangan dan Perekonomian Daerah .....	42
5. Tata Ruang Wilayah.....	43
6. Kondisi Sosial dan Budaya di Kabupaten Dairi.....	43
a. Fasilitas Pendidikan .....	43
b. Jumlah Penduduk Miskin.....	44
7. Kelembagaan Pemerintah .....	45
B. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Dairi	
1. Hasil Pilkada Serentak di Kab. Dairi .....	46

#### **BAB IV : PILKADA SERENTAK 2018 DI KABUPATEN DAIRI**

- A. Strategi yang Dilakukan Pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing Dalam Pilkada Serentak 2018 di Kab. Dairi .....49
- B. Peluang dan Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan Strategi Pemenangan Pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing Dalam Pilkada Serentak 2018 di Kab. Dairi.....55

#### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....67
- B. Saran .....68

#### **DAFTAR PUSTAKA .....69**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Dinamika politik di Indonesia dapat dilihat dari peta demokrasi yang terjadi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan kini pada tahun 2015, Indonesia menapakkan sejarah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang tepatnya digelar pada tanggal 09 Desember 2015.

Pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati) merupakan salah satu media masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih dan menentukan figure yang cocok untuk memimpin mereka. Pemilihan secara langsung juga sebagai media perwujudan demokrasi yaitu memilih dengan berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dimana kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi dianutnya sistem demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, harus dikelola sedemikian rupa, sehingga seluruh masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan jajaran eksekutif.

Beberapa tahapan dalam pemilihan di eksekutif, baik pemilihan presiden-wakil presiden atau pun kepala daerah dan wakil kepala daerah, meliputi pencalonan kandidat

ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian seleksi berkas, pengundian nomor bagi kandidat, yang lolos seleksi, penentuan jadwal kampanye, dilanjutkan dengan kampanye oleh masing masing kandidat, kemudian pelaksanaa pemilihan serta yang terakhir adalah pengumuman resmi oleh KPU/KPUD terhadap kandidat yang dinyatakan menang dalam sebuah pemilihan.

Ditahap kampanye, menjadi tahapan penting bagi setiap kandidat untuk benar-benar mempengaruhi masyarakat agar memilih kandidat tersebut. Kampanye yang merupakan salah satu bagian dari pemasaran politik (*marketing politik*), harus dipikirkan matang-matang oleh oleh setiap kandidat atau tim suksesnya. Ditahap ini semua kandidat dan tim suksesnya harus bekerja keras untuk bisa memperoleh suara yang banyak dan menang dalam pemilihan yang digelar.

Kampanye dalam sebuah pemilihan baik presiden-wakil presiden, pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah harus diatur dengan strategi yang baik. Kampanye merupakan sebuah kegiatan untuk menarik simpati dan meningkatkan elektabilitas serta popularitas tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perolehan suara dalam pemilihan.

Pemilihan kepala daerah juga sebagai media masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon calon kepala daerah terbaik sesuai harapan masyarakatnya. Setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pasti memiliki tujuan untuk memenangkan kompetisi atau persaingan tersebut, semua kandidat tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk menang. Strategi kampanye menjadi penting dalam memengkan sebuah pemilihan, baik pemilihan presiden – wakil presiden ,maupun pemilihan kepala daerah.

Menurut Clausewitz, strategi merupakan pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan pertempuran.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Beaufree, strategi politik merupakan seni yang menggunakan semua kekuatan untuk mencapai semua tujuan yang ditetapkan oleh politik.<sup>2</sup> Didalam konteks penelitian ini penulis ingin mengetahui strategi kampanye yang digunakan calon-calon kepala daerah dalam pilkada serentak 27 Juni 2018.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu *event* pemilihan pada tahun 2018 ini diadakan serentak seluruh Indonesia. Pilkada serentak pada gelombang ketiga diikuti 171 daerah diseluruh Indonesia. Salah satu daerah yang mengikuti atau menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu Kabupaten Dairi, tentunya menarik untuk diteliti karena keadaan masyarakatnya yang heterogen, sehingga akan menimbulkan berbagi persepsi dikalangan masyarakat yang heterogen tersebut.

Pilkada tahun 2018 yang dilaksanakan di Kabupaten Dairi pada tanggal 27 Juni 2018, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah untuk ketiga kalinya di Kabupaten Dairi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 kemarin. Kabupaten Dairi memiliki tiga pasangan calon yang diikuti oleh pasangan No urut 1 Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang yang diusung oleh partai politik diantaranya Golkar dan PAN. Pada No urut 2 ada Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing yang diusung oleh partai politik yaitu Demokrat, PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, Gerindra, dan PKPI. Rimso Sinaga dan Bilker Purba maju melalui jalur perseorangan.

---

<sup>1</sup> Arifin Anwar, *Komunikasi Politik : Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta : PT Balai Pustaka,2013), h. 161

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 167



Kabupaten Dairi memiliki 15 Kecamatan yaitu, Kec. Sidikalang, Kec. Sitinjo, Kec. Siempat Nempu Hulu, Kec. Parbuluan, Kec. Berampu, Kec. Gunung Sitember, Kec. Lae Parira, Kec. Pegagan Hilir, Kec. Siempat Nempu, Kec. Siempat Nempu Hilir, Kec. Silahisabungan, Kec. Silima Pungga-Pungga, Kec. Sumbul, Kec. Tanah Pinem, dan Kec. Tigalingga. Mayoritas penduduk Kab. Dairi bekerja sebagai petani. Dari 15 kecamatan yang ada di Dairi, ada 14 kecamatan memenangkan pasangan Eddy-Jimmy, satu kecamatan yaitu kec. Parbuluan memenangkan pasangan Depri-Azhar.<sup>3</sup>

Berbicara masalah Pilkada sangat erat kaitannya dengan pemimpin. Pemimpin adalah tokoh atau *elit* anggota sistem sosial yang dikenal dan berupaya mempengaruhi pengikutnya secara langsung atau tidak langsung.<sup>4</sup> Seorang pemimpin merupakan seorang Intelektual, seorang yang cerdas, berakal, cendekiawan, dan mudah memahami sesuatu. Dengan kata lain ia mempunyai kecerdasan Intelektual yang tinggi atau intelegensia (*intelligence*).<sup>5</sup>

Seorang pemimpin adalah tokoh panutan atau figur sentral, teladan bagi rakyat dan masyarakat di bawah kepemimpinannya. Hal ini merupakan suatu sikap dan perbuatan yang teramat sulit, dengan demikian seorang pemimpin itu suri tauladan bagi umatnya, dan memerlukan *Konsistensi* serta kepribadian yang agung. Sebab ia menjadi pusat perhatian semua lapisan masyarakat.<sup>6</sup> Maka untuk menjadi seorang pemimpin ada kriteria yang harus dipenuhi. Secara garis besar kriteria calon pemimpin berdasarkan ketentuan syar'i dan suri tauladan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin maka seorang pemimpin harus memiliki sifat Amanah, Tabligh, Fathanah, dan Siddiq.

---

<sup>3</sup> Sumber : Data KPU Dairi, 2018

<sup>4</sup> Wirawan, *Kepemimpinan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) h. 275

<sup>5</sup> *Ibid* .h. 284

<sup>6</sup> *Ibid* . h. 290

Pemilukada dilaksanakan di Indonesia dalam mencari pemimpin kepala daerah, pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perkembangan, dari pemilukada yang dipilih melalui pemilihan tidak langsung yang diwakili oleh DPRD dan satu diantaranya dipilih oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2005 pemilihan kepala daerah dipilih langsung sesuai dengan UU yang telah disahkan yaitu UU No.32 Tahun 2004 dan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 01 Juni 2005 di Indonesia dan pada tanggal 09 Desember 2015 diadakan pemilihan kepala daerah secara serentak di beberapa daerah. Tentu sangat menarik bagi penulis mengangkat judul tersebut karena pasangan Eddy Berutu – Jimmy Sihombing dapat mengantongi suara di 14 kecamatan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

Kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan, berdasarkan UU No.12 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2008 dan PP No. 6 Tahun 2005, syarat-syaratnya antara lain.<sup>7</sup>

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

---

<sup>7</sup> Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum telah dihapus;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai pembayaran pajak;
- m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah dan mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya;

Maka dari uraian tersebut penulis tertarik mengambil judul “Strategi Pemenangan Pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing Dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Dairi.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan pasangan Eddy KA Berutu – Jimmy Sihombing dalam pilkada serentak 2018 di kabupaten Dairi ?
2. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam strategi pemenangan pasangan Eddy KA Berutu – Jimmy Sihombing dalam Pilkada Serentak 2018 di Kab. Dairi.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan pasangan Eddy KA Berutu – Jimmy Sihombing dalam memenangkan pilkada serentak 2018 di Kab. Dairi.
2. Untuk mengetahui apa saja factor pendukung dan penghambat dalam strategi pemenangan pasangan Eddy KA Berutu – Jimmy Sihombing dalam Pilkada Serentak 2018 di Kab. Dairi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :
  - a. Sebagai sarana pembandingan bagi ilmu pengetahuan dalam menambah kajian tentang strategi pemenangan kandidat pada pilkada serentak 2018.
2. Secara Praktis :
  - a. Memberikan masukan kepada calon bupati dan calon wakil bupati pada pemenangan pilkada serentak.
  - b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa jika suatu saat ada yang membahas permasalahan yang sama atau relevan dengan judul ini.

## E. Batasan Istilah

Untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka perlu untuk membuat batasan istilah terhadap judul penelitian ini yaitu :

1. **Strategi** menurut Stephanie K. Marcus adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>8</sup> Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi yang dimaksud di judul ini yaitu tentang berbagai cara dan metodologi yang digunakan oleh kandidat baik pada aspek internal maupun aspek eksternal.
2. **Pemenangan** yang berasal dari kata menang yang artinya dapat mengalahkan (musuh, lawan, saingan) atau unggul, jadi maksud dalam pemenangan dalam judul ini adalah usaha, cara, atau proses yang dilakukan oleh kandidat untuk menang dalam pilkada serentak 2018.
3. **Pilkada serentak** adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah untuk melahirkan pemimpin daerah, “ Gubernur, Bupati, Walikota yang masing masing kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pilihan secara demokrasi. Pilkada serentak yang dimaksud penulis dalam judul ini adalah pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia yang dilakukan pada tanggal dan waktu yang bersamaan.
4. **Dairi** adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia yang ber ibukota Sidikalang. Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada

---

<sup>8</sup> Husein Umar, *Strategi Management In Action*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 30-31

di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare, yaitu sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.160.000 hektare) yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara. Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 s.d. 1.250 m di atas permukaan laut, dengan 15 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi akhir tahun 2004 adalah sebanyak 271.521 jiwa dengan banyaknya rumah tangga sebesar 59.197. Penyebaran penduduk tersebut tidak merata di 15 kecamatan definitif.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud penulis dalam judul “Strategi Pemenangan Pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing Dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Dairi” adalah upaya dan cara cara yang tengah dilakukan pasangan Eddy KA Berutu – Jimmy Sihombing dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pilkada serentak 2018 di Kabupaten Dairi.

---

<sup>9</sup> [www.dairikab.go.id](http://www.dairikab.go.id) (website resmi kab.Dairi)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian.**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dalam kancan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini Field Reasearch yang bersifat kualitatif. Yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang Nampak dan sebagaimana adanya.<sup>11</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat dekskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Strategi Pemenangan Pasangan Eddy KA Berutu – Jimmy Sihombing dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Dairi.

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 32.

<sup>11</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gema Press, 1987), h. 63.



## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis menjadikan pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing dan beberapa tim sukses dari pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing sebagai responden dalam mencari data-data.

### a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikannya. Data sekunder juga disebut data tersedia.<sup>13</sup> Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, *literature*, karya-karya, dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut dipergunakan saling melengkapi, karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data pustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan selama proses penelitian ini berupa kata-kata, tindakan atau aktivitas dan dokumen, sebagaimana dijelaskan Lofland, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya

---

<sup>12</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), h. 81

<sup>13</sup> *Ibid.*

merupakan data tambahan.<sup>14</sup> Data yang berupa kata-kata dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview).

Lebih jelasnya teknik pengolahan data yang digunakan adalah Wawancara Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.

- a. Wawancara adalah suatu cara atau kepandaian melakukan Tanya jawab untuk memperoleh keterangan, informasi dan sejenisnya. Selanjutnya data berupa tindakan dan aktivitas yang dilakukan informan dan dikumpulkan melalui pengamatan (observasi). Sedangkan data dan informasi tertulis dilakukan dengan teknik pengkajian dokumen. Data dokumen tersebut misalnya buku referensi, Koran, artikel, dokumen, dan sebagainya. Semua jenis data yang dikumpulkan ini digunakan peneliti untuk kepentingan pendalaman atas permasalahan yang sedang diteliti dilapangan. Wawancara ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan observasi semata, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai bapak Eddy KA Berutu selaku Bupati Dairi terpilih dan bapak Jimmy Sihombing sebagai Wakil Bupati Dairi terpilih dan beberapa tim sukses pemenangan pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing serta beberapa masyarakat satu kecamatan yang mayoritas memilih pasangan tersebut dalam pilkada serentak 27 Juni 2018 di Kab. Dairi.
- b. Kuesioner (Angket) adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada.

---

<sup>14</sup> Lexy, J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung : Remaja Rosdakarya, 994), h. 4

- c. Dokumentasi asal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu dikawasan Kabupaten Dairi. Daerah Kabupaten Dairi mempunyai Luas 191.625 Hektar yaitu sekitar 2,68% dari luas Provinsi Sumatera Utara ( 7.160.000 Hektar) dimana Kabupaten Dairi terletak sebelah Barat Laut Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Dairi sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan berbukit-bukit yang terletak antara 98000'-98030 dan 2015'-3000 LU. Pada umumnya kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 s/d 1.066 meter diatas permukaan laut. Sedangkan Kec. Tigalingga, Kec. Siempat Nempu dan Kecamatan Silima Pungga-Pungga terletak pada ketinggian antara 400-1.360 m diatas permukaan laut. Kec. Sumbul, Sidikalang, Kerajaan dan Kec. Tanah Pinem berada pada ketinggian 700-1600 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Dairi yang terletak disebelah barat laut provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi NAD) dan Kabupaten Tanah Karo. Sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Propinsi NAD).

#### **5. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, ,maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua data untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan di analisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudia dipisahkan menurut kategori untuk diambil kesimpulan.<sup>15</sup> Proses analisis data model ini menempuh langkah dan tahapan sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1993), h. 132

a. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar dari data data penelitian yang dikumpulkan di lapangan. Secara teoritis dalam penelitian kualitatif reduksi data diperlukan untuk membuat data penelitian lebih mudah di akses serta dipahami dan deskripsikan dalam laporan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan temuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskripsi. Deskripsi laporan penelitian di susun guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam sebuah bentuk yang utuh dan mudah dipahami. Sehingga bagi peneliti dapat memahami apa yang berlangsung untuk menarik kesimpulan penelitian. Pada hakikatnya, langkah kedua tahapan penyajian data penelitian ini adalah juga merupakan bagian dan rangkain yang tidak terpisahkan dari proses analisis data penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi, maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap-tahap awal bersifat longgar tetapi terbuka untuk di kritisi. Selanjutnya akan berkembang menjadi kesimpulan akhir yang bersifat final setelah melalui proses pemeriksaan secara berkelanjutan. Proses verifikasi dalam hal ini bertujuan untuk melakukan tinjauan umum terhadap seluruh bahan dan informasi penelitian yang dikumpulkan selama proses penelitian yang dilakukan. Jika data dan informasi yang dikumpulkan dipandang telah jauh maka penarikan kesimpulan final harus dilakukan. Jika masih diperlukan, data dan informasi tambahan dicari kembali.

d. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data yang dikumpulkan selama dilapangan dilakukan dengan beberapa teknik yang dijelaskan oleh Moloeng, antara lain : Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan penelitian, pengecekan teman sejawat, sumber maupun teori yang ada. Yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan silang dan membandingkan semua bahan dan data penelitian yang akan dikumpulkan khusus dalam penelitian ini bagaimana langkahnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan laporan hasil penelitian ini disusun kedalam lima bab. Pembagian bab hanya bertujuan untuk pembahasan focus isi mengikuti struktur umum dalam penelitian ilmiah. Antara bab yang satu dengan bab yang lain pada hakikatnya adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Adapun struktur dari isi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri atas Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II menyajikan gambaran Pilkada dan Strategi kandidat pada pilkada serentak 2018 Kabupaten Dairi.

Bab III membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari : Geografi, Sosiokultural, Keberagaman, pelaksanaan pilkada serentak 2018 di kab. Dairi.

Bab IV menyajikan Strategi yang dilakukan pasangan Eddy KA Berutu- Jimmy Sihombing dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Dairi tentang bagaimana strategi pemenangan Pasangan Eddy KA Berutu – Jimmy Sihombing pada Pilkada Dairi 2018.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran saran.

## **BAB II**

### **PILKADA DAN STRATEGI KANDIDAT**

#### **A. PILKADA**

##### **1. Pengertian**

Pilkada adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi atau Kab/kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>16</sup> Pilkada dilandaskan semangat otonomi daerah yang digulirkan setelah masa reformasi bergulir pada tahun 1998 dan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Namun Pilkada baru terlaksana pada tahun 2005 mengingat mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan, terutama perundangan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan di daerah seluruh Indonesia.

Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 Tahun 2010. Pemilihan Kepala Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka memilih kepala daerah yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi daerah yang dipimpinnya, karena yang diharapkan kepala daerah terpilih adalah orang-orang daerah yang bersangkutan (putra daerah). Namun saat sekarang ini sangat sulit untuk menemukan seorang putra daerah yang benar-benar ingin memajukan daerahnya sendiri, menjadi polemic tersendiri bagi kita sebagai anak bangsa dan merosotnya rasa perjuangan untuk daerah dan bangsa kita sendiri.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.



Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah, haruslah dipandang dari berbagai sudut pandang. Namun, yang terpenting adalah melihat kedalam aturan tentang status dan peran secara normatif dari seorang kepala daerah tersebut. Ada dua peran yang harus diperankan, yakni pertama ia harus berperan sebagai kepala daerah otonom yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian peran kedua, kepala daerah khususnya untuk daerah provinsi, ia harus berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang bertugas dan memiliki wewenang untuk mengawasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pilkada serentak juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam sebuah pemerintahan.

Pelimpahan tugas dan wewenang gubernur dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di daerah didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Peran Gubernur, dimana pada hakikatnya secara formal pemerintah provinsi tidak memiliki rakyat, karna sudah terdesentralisasi dan menjadi milik pemerintah kab/kota, namun demikian karna ikatan sosial dan etnis hubungan kekerabatan tersebut semakin akrab dan ikatan keakraban itu semakin meluas dan merasakan hubungan tersebut menjadi suatu pola hubungan antar kedaerahan. Peran pemerintah provinsi hanya bersifat fasilitasi dan pengawasan jalannya pemerintahan sebagaimana kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah, untuk menjamin rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Pilkada langsung (dan serentak) merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Pilkada adalah bagian dari

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.128-129

proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengtheing democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif.<sup>18</sup>

Pelaksanaan Pilkada langsung pada dasarnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik.<sup>19</sup> Kini pilkada tidak hanya dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun sekali, namun juga serentak sebagaimana dijelaskan UU No.8 Tahun 2015 dan UU NO.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah.<sup>20</sup> Kebebasan individu dan persamaan hak politik hanya formalitas yang membodohi masyarakat, karena dalam menentukan seorang kepala daerah masyarakat hanya memiliki hak memilih namun yang menentukan tetaplah dari golongan partai politik. Sehingga partai politik terlihat seperti yang mempunyai hak penuh dalam menentukan seorang pemimpin, dengan mencalonkan kader-kader yang dianggap unggul dalam partainya.

Sejak disahkan UU No.8 Tahun 2015, konstalasi politik di aras lokal pun menjadi berubah. Perdebatan politik hukum pilkada itu menemukan ujungnya. UU No.8 Tahun 2015 menegaskan bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung dan serentak.<sup>21</sup> Dengan hadirnya pilkada serentak, menjadi gambaran bahwa pilkada langsung yang diadakan sejak 2005 itu mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan yang dilaksanakan secara serentak dalam tujuh gelombang dan pada akhirnya akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2027.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Depok : Pustaka Kemang, 2016), h.41

<sup>19</sup> *Ibid*,h.42

<sup>20</sup> Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak* (Jakarta : PT Mizan Publika, 2016), h.25

<sup>21</sup> *Ibid*,h.65

<sup>22</sup> *Ibid*,h.68

## 2. Landasan Hukum Pilkada

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Negeri RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain UUD No 1 Tahun 1945, Undang-Undang No.22 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang No.18 Tahun 1965, Undang-Undang No.5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang No.32 Tahun 2004.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 Tahun 2010.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 telah diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD, dalam mengawasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 Tahun 2010.

---

<sup>23</sup> Zabakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak...*,h. 54

<sup>24</sup> *Ibid.*130

Peraturan yang terkait langsung dengan Pilkada Serentak antara lain : UU No.22/2014, Perppu No.1/2014; UU No.1/2015, dan UU No.8/2015. Selain itu peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah perlu disebutkan juga karna pelaksanaan pilkada serentak terkait erat dengan pelaksanaan otonomi dan sistem pemerintahan ditingkat lokal. Adapun peraturan perundangan tentang pemerintah daerah yang paling relevan saat ini adalah UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah, Perppu No.2/2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2014, dan terakhir UU No. 9/2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah.<sup>25</sup>

Demikian pun berbagai Peraturan Pelaksanaan terkait pilkada serentak yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjadi landasan yuridis, antara lain (1) PKPU No. 2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Serentak; (2) PKPU No. 3/2015 tentang Tata Kerja Pemilukada Serentak, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

(3) PKPU No. 4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilu; (4) PKPU No. 5/2015 tentang Sosialisai dan dan Partisipasi Masyarakat; (5) PKPU No. 6/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak; (6) PKPU No. 7/2015 tentang Kampanye Pemilukada Serentak; (7) PKPU No. 8/2015 tentang Dana Kampanye (8) PKPU No. 9/2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah; (9) PKPU No.10/2015 tentang Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara; (10) PKPU No. 11/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Depok : Pustaka Kemang, 2016) h.15

<sup>26</sup> *Ibid.*

### 3. Sejarah Pelaksanaan Pilkada Serentak

Di Indonesia telah berkali-kali dilangsungkan pemilihan umum yang disebut-sebut pesta demokrasi Pancasila. Satu kali sewaktu pemerintahan orde lama dan enam kali sewaktu pemerintahan orde baru, serta dua kali selama era reformasi. Umumnya, ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai di Indonesia, yaitu sebagai berikut : Sistem Distrik, yaitu sistem ini per lokasi (daerah pemilihan) dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan, jadi banyak jumlah suara akan terbuang. Tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung maka pemilih akrab dengan wakilnya (*Personen Stelsel*), satu distrik biasanya satu wakil (*Single Member Constituency*).

Sistem Proporsional, sistem ini perjumlah penduduk pemilih. Misalnya 40.000 penduduk pemilih 1 wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah sekelompok orang yang diajukan kontestan pemilu (*multy member constituency*), yang dikenal dengan lewat tanda gambar (*lijsten stelsel*) sehingga wakil dan pemilih kurang akrab. Tetapi sisa dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan. Dengan begitu partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi, karena suara pemilih dihargai.

Indonesia berada ditengah-tengah kedua sistem ini (sistem campuran) dalam pemilihan selama orde baru, tetapi sedikit cenderung agak mirip pada sistem proporsional.<sup>27</sup>

Setelah Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat 4 perubahan mendasar dalam mekanisme Pemilu. Pertama, kembalinya sistem ‘multi partai’ dari sistem ‘tri partai’ dalam Pemilu yang direalisasikan pada 7

---

<sup>27</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta:2011)Ed.Rev,h.109-110

Juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai. Kedua, pada Pemilu 2004, Pemilu diadakan dua kali, Pemilu pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat dan Pemilu kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dengan dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2005 (tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) secara langsung seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Perubahan keempat, pada pemilu 2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan perhitungan suara menggunakan suara terbanyak dan bukan no urut caleg. Keempat perubahan mendasar ini telah mempengaruhi sistem, struktur, intensitas persaingan, dan perilaku institusi-institusi yang terlibat dalam setiap Pemilu baik nasional maupun daerah.

Pemilu yang diadakan tahun 2009 adalah yang kesepuluh kalinya sejak Indonesia merdeka. Seperti sudah disebutkan, Pemilu pertama kali pertama kali diadakan tahun 1995 dan yang terakhir dilakukan tahun 2009. Berbeda dengan Pemilu Pemilu sebelumnya, pemilu 2004 memulai babak baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali rakyat akan memilih presiden secara langsung, bebas dan terbuka. Sebelumnya pemilihan presiden dilakukan melalui mekanisme yang ada di MPR. Tidak jarang proses ini melalui lobi-lobi politik, padahal pengambilan keputusan melalui lobi politik dianggap praktik yang Machiavelli-istik (Haris 2001). Pihak-pihak yang bisa memberikan tekanan melalui proses tawar-menawar politik akan berpeluang besar dalam memenangkan pemilihan di parlemen.

Sehingga tidak jarang keputusan yang dihasilkan MPR berbeda dengan keinginan rakyat. Hal ini terjadi di Indonesia ditahun 1999, PDI memenangkan jumlah perolehan suara dalam pemilu, namun gagal menghantarkan Megawati menjadi presiden. Hal ini juga telah menyadarkan publik akan pentingnya dilakukan pemilihan presiden secara

langsung. Hasil proses ini bisa kita lihat dengan adanya perubahan mendasar Pemilu 2004 dari pemilu sebelumnya, yaitu diberikan Rakyat Indonesia untuk menentukan sendiri presiden mereka melalui pemilu secara langsung, bebas dan terbuka.<sup>28</sup>

Perubahan politik yang radika terjadi di Indonesia ditandai dengan runtuhnya orde baru yang menerapkan sistem politik yang otoritarian, yang kemudian berubah sistem politik demokrasi. Demikian pula sistem yang sentralisasi berubah desentralisasi yang lebih dikenal otonomi daerah. Konsekuensi itu semua itu antara lain adanya pemillihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tentang pilkada langsung merupakan kemajuan demokrasi di Indonesia yang menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut.<sup>29</sup>

Pilkada langsung dianggap lebih demokratis dengan dua pertimbangan. Pertama, pilkada langsung memberi kesempatan yang lebih luas untuk tampilnya/terpilihnya kepala daerah sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua, dengan Pilkada langsung, maka stabilitas pemerintahan lebih terjaga berhubung kepala daerah tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD.<sup>30</sup>

Sejak ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, mulai terjadi harmonisasi hubungan antar kewenangan rakyat dan pemerintah. Pasal 1 dan 3 UU No. 8 Tahun 2015 menetapkan bahwa rakyat diberikan amanah penuh dalam menentukan pemimpin daerahnya, meskipun pelaksanaannya diatur

---

<sup>28</sup> Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2010),h.159

<sup>29</sup> Irtanto, *Dinamika Politik Lokal*,(Yogyakarta : Pustaka Belajar; 2008), h.159

<sup>30</sup> *Ibid*,h. 162

secara serentak oleh pemerintah.<sup>31</sup> Pelaksanaan Pilkada secara langsung dinilai sudah cukup baik, namun masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan tersebut. Pilkada langsung memberikan peluang korupsi dari berbagai pihak dan tidak sedikit menimbulkan konflik serta kesenjangan antar masyarakat di daerah tersebut. Maka disempurnakan lagi dengan dilaksanakan pilkada langsung yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Maka pada masa sekarang ini pelaksanaan pilkada tidak hanya dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun sekali, namun juga dilaksanakan secara serentak sebagaimana yang dijelaskan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui UU No. 8 Tahun 2015 memberikan skema ulang tahapan pilkada serentak menjadi tujuh gelombang.<sup>32</sup>

## **B. STRATEGI KANDIDAT**

### **1. Pengertian Kandidat**

Kandidat adalah calon atau bakal calon. Peserta dalam pemilihan umum kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD.<sup>33</sup>

### **2. Pengertian Strategi Kandidat**

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu "*stratos*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin. Dengan demikian strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *Strategos* yang artinya

---

<sup>31</sup> Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2016), h.24

<sup>32</sup> *Ibid*, h.25

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)h.500



pemimpin tentara tingkat atas. *Art Of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan, yakni “tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya.”

Karl Von Clausewitz (1780-1831) merumuskan strategi ialah “suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang,” sementara Marthin-Anderson (1968) merumuskan “Strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan *Intelegensi*/Pikiran untuk membawa sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan maksimal dan efisien. Strategi yang dimaksud yaitu tentang berbagai cara dan metodologi yang digunakan kandidat pilkada, baik pada aspek internal atau yang dikenal dengan tim pemenangan kandidat, serta aspek eksternal, yaitu tim sukses yang dibentuk partai politik.

David Horowitz dalam *Art of Political War* (Seni dari politik perang) terdapat enam prinsip dalam strategi politik yang akan dipaparkan sebagai berikut :

- a. Politik adalah perang dalam peralatan lain;
- b. Politik adalah perang memperebutkan posisi;
- c. Dalam Politik adalah yang menang adalah penyerang;
- d. Posisi didefenisikan dengan kekuatan dan harapan;
- e. Senjata politik adalah symbol ketakutan dan harapan; dan
- f. Kemenangan selalu berada di pihak rakyat.

Pada sebuah realita dimasyarakat sebuah kemenangan yang dinyatakan berpihak kepada rakyat ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, karena seorang pemimpin yang telah mengumbar banyak janji demi mendapatkan keyakinan masyarakat dan setelah terpilih menjadi lupa akan janji dan masyarakat yang

memberikan kepercayaan dan memberikan sebuah kekuasaan menjadi wakil dari masyarakat.

Strategi kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah adalah suatu cara yang dilakukan oleh para calon untuk mengetahui kekuatan, kekuatan dan kelemahan dan peluang dari lawan. Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi. Oleh karena itu, para pakar strategi tidak hanya lahir dari kalangan yang memiliki latar belakang militer, tetapi juga dari profesi lain, misalnya pakar strategi Henry Kissinger berlatar belakang sejarah, Thomas Schelling berlatar belakang ekonomi, dan Albert Wohlstetter berlatar belakang matematika. Adapun strategi yang ditempuh untuk memenangkan perebutan kekuasaan secara legal di daerah adalah lewat pemilihan umum. Masing-masing elit mempunyai taktik dan strateginya sendiri untuk memuluskan kepentingan kekuasaan. Namun, seperti dikatakan Bambang Purwoko, bahwa kenyataannya pilkada belum menjadi jaminan bagi lahirnya proses demokrasi, meski sudah ada regulasi yang mengatur.<sup>34</sup> Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Taktik digunakan dalam strategi untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, sedangkan dalam strategi untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang sehingga dapat dikatakan tanpa strategi, taktik tidak dapat digunakan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980) membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima, sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.”

---

<sup>34</sup> Abd. Halim, *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatisasinya (Perspektif Teori Modal dan Panggung)*, (Yogyakarta : LP2B;2014), h.37

Untuk menetapkan strategi dapat digunakan *SWOT* sebagai peralatan untuk menganalisis :

S = *Strengths* - Kekuatan-kekuatan yang dimiliki partai

W = *Weakness* – Kelemahan-kelemahan yang ada pada partai

O = *Opportunities* – Peluang peluang yang mungkin bisa diperoleh partai

T = *Threats* – ancaman ancaman yang bisa diterima oleh partai.<sup>35</sup>

Pemilihan strategis harus ada hal-hal yang diprioritaskan dalam berperang, yang pertama harus dilakukan adalah menyerang strategi lawan, yang kedua adalah menghancurkan aliansi lawan, yang ketiga adalah menghancurkan analisa lawan, yang keempat adalah menyerang tentara lawan dan yang terakhir adalah yang menduduki kota yang dibentengi lawan. Oleh karena itu pengenalan terhadap pihak lawan adalah sangat penting.

Penetapan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam kampanye, sebab jika penetapan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, material, dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para ahli perencanaan kampanye.<sup>36</sup>

Sebuah kampanye menurut Kotler dan Roberto (1989) "*Campaign is an organized effort conducted by one grup (the change agent) which intens to persuade others (the target adopters, to accept, modify, or abandon certain, ideas, attitudes, practices, and behavior*". Kampanye adalah sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap, atau pridabi tertentu. Kampanye

---

<sup>35</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers; 2011),h. 238-237

<sup>36</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*(Jakarta : Rajawali Pers, 2011),h. 236

politik adalah sebuah peristiwa yang di dramatisasi. Oleh karena itu Richard A. Josylin dalam swanson (1990) melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh actor-aktor politik. Dalam praktik, tidak sedikit kegiatan kampanye yang dilakukan menemui kegagalan, tetapi banyak juga yang berhasil karena dirancang dengan baik sesuai oleh ahli yang berperan sebagai *spin doctor*.<sup>37</sup>

Komunikator dalam kajian komunikasi menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Karena itu jika suatu proses kampanye tidak berhasil dengan baik, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator (juru kampanye), karena komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan, memilih media yang tepat, dan mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu seorang komunikator yang akan beryindak sebagai juru kampanye harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya kreatifitas.<sup>38</sup>

Kampanye yang dilakukan didalamnya terdapat pesan yang harus dipahami oleh seorang juru kampanye. Maka pesan dalam kampanye haruslah memiliki teknik-teknik tertentu dalam penyusunan pesan. Berbicara penyusunan pesan, maka yang dimaksud pesan dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seorang dalam bentuk symbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam serangkaian makna.<sup>39</sup>

Maka ada tiga teori yang membicarakan tentang penyusunan pesan yaitu :

- a. *Over power'em theory*. Teori ini menunjukkan bila pesan sering sekali diulang, panjang dan cukup keras, maka pesan itu berlalu dari khalayak.

---

<sup>37</sup> *Ibid*,h. 229-230

<sup>38</sup> *Ibid*,h.238-239

<sup>39</sup> *Ibid*,h.257

- b. *Glamour Theory*. Suatu pesan (ide) yang dikemas dengan cantik, kemudian ditawarkan dengan daya persuasi, maka khalayak akan tertarik untuk memiliki ide itu.
- c. *Don't tele'em theory*. Bila suatu ide tidak disampaikan kepada orang lain, maka mereka tidak akan memegangnya dan menyayakannya. Karena itu mereka tidak akan membuat pendapat tentang ide itu.

### **3. Tujuan Strategi Kandidat**

Pemilihan strategi yang tepat akan menjadi sangat penting, agar proses pemenangan bisa efektif dan efisien (secara politik dan ekonomi). Disinilah pentingnya bagi para kandidat dan elemen pendukung mendesain dan menyusun rencana strategi pemenangan kontestasi pemilihan kepala daerah. Pemilihan strategi tentu ditujukan untuk tiga hal yaitu pertama, untuk mengetahui peluang persentasi kemenangan sebelum penyelenggaraan pilkada dilaksanakan. Kedua, untuk mengetahui siapa sesungguhnya lawan politik yang kuat dan ketiga untuk mengetahui berapa resource financial yang harus dipersiapkan.

Ketiga tujuan tersebut tentu masih menjadi informasi awal menuju hasil akhir, yaitu memenangkan pilkada(kemenangan). Oleh sebab itu pengetahuan dan pemahaman yang mendasar soal berbagai strategi dan cara untuk melewati seluruh proses dan tahapan pilkada merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Keberhasilan dalam sebuah strategi politik erat kaitannya dengan pemasaran politik, dalam sebuah pemasaran politik sedapat mungkin diawali dengan kegiatan pembentukan tim kerja yang biasa disebut "Tim Sukses". Tim sukses direkrut dari tenaga-tenaga potensial sesuai tugas dan fungsinya. Sebuah tim sukses biasanya terdiri dari Penasihat, Tim Ahli, Tim Riset dan Litbang, Tim Pengumpul Dana, serta Tim

Kampanye, Tim Penggalangan Massa, Tim Hubungan Antar Daerah, Tim Pengamat (Intelijen), Tim Pengaman, serta Tim Pengumpul Suara (*vote getter*).<sup>40</sup> Sangat penting dalam memilih atau merekrut orang-orang yang akan menjadi tim sukses dan terkait didalam tim sukses tersebut, karena akan mempengaruhi sebuah keberhasilan dalam suatu target dan tujuan.

Pada dasarnya, strategi pemenangan mencakup beberapa tipe strategi, diantaranya strategi organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi tim pemenangan, yang didalamnya mencakup perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai, inisiatif-inisiatif strategi, serta strategi program karena strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.

---

<sup>40</sup> *Ibid*,h.266

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAIRI**

#### **A. Sejarah Kabupaten Dairi**

Sejak tahun 1958, aspirasi masyarakat Dairi untuk memperjuangkan Daerahnya sebagai Kabupaten otonom tetap tumbuh berkembang dengan mengutus pertama tokoh masyarakat ke Jakarta untuk menyampaikan hasrat dimaksud agar disetujui. Aspirasi dan tuntutan tersebut terus berkembang sampai tahun 1964 dan saat itu tokoh masyarakat, Mangantar Solin, dkk diutus dan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan di Departemen Dalam Negeri saat itu Bpk. Sanusi Hardjadinata yang paa tahun itu menyetujui Daerah Otonom kabupten yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam situasi tersebut dikeluarkan Undang-Undang darurat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor. 4 tahun 1964 pada tanggal 13 Februari 1964 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan pemilihan Bupati KDH Dairi setelah beliau selesai menyusun Anggota DPRD sebanyak 20 orang, dilanjutkan dengan pemilihan Bupati.

Saat itu terpilih Mayor Raja Nembah Maha, yang memperoleh suara terbanyak menjadi KDH Tingkat II Kabupaten Dairi dan Wal Mantas Habeahan terpilih sebagai Sekretaris Daerah. Kemudian oleh pemerintah pusat dan DPR RI, ditetapkanlah Undang-Undang No.15 Tahun 1964 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (sebagai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964). Peresmian Kabupaten Daerah Tingkat II Otonom dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 Mei 1964 bertempat di Gedung Nasional Sidikalang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, maka wilayah kabupaten Dairi pada saat pembentukannya terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Sidikalang, Sumbul, Tigalingga, Tanah Pinem, Salak, Kerajaan, Silima Pungga Pungga, dan Siempat Nempu.<sup>41</sup>

## **B. Mengenal Wilayah Kabupaten Dairi.**

Daerah Kabupaten Dairi mempunyai Luas 191.625 Hektar yaitu sekitar 2,68% dari luas Provinsi Sumatera Utara ( 7.160.000 Hektar) dimana Kabupaten Dairi terletak sebelah Barat Laut Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Dairi sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan berbukit-bukit yang terletak antara 98000'-98030 dan 2015'-3000 LU.<sup>42</sup>

Pada umumnya kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 s/d 1.066 meter diatas permukaan laut. Sedangkan Kec. Tigalingga, Kec. Siempat Nempu dan Kecamatan Silima Pungga-Pungga terletak pada ketinggian antara 400-1.360 m diatas permukaan laut. Kec. Sumbul, Sidikalang, Kerajaan dan Kec. Tanah Pinem berada pada ketinggian 700-1600 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Dairi yang terletak disebelah barat laut provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi NAD) dan Kabupaten Tanah Karo. Sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Propinsi NAD).

### **1. Kondisi Demografi**

Berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Dairi 279.090 jiwa, terdiri dari 139.401 penduduk laki-laki (49,95%) dan

---

<sup>41</sup> [www.dairikab.go.id](http://www.dairikab.go.id)

<sup>42</sup> [www.dairikab.go.id](http://www.dairikab.go.id)



139.689 penduduk perempuan (50.05%) dengan rasio jenis kelamin 99.79% dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 144.77 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sementara itu jumlah rumah tangga adalah 66.825 dengan rata-rata penduduk tiap rumah tangga sebesar 4.18 jiwa/rumah tangga. Menurut persebaran penduduk tiap kecamatan, penduduk yang lebih banyak adalah Kecamatan Sidikalang, yaitu 50.050 jiwa (17.93%), dengan rata-rata 708.22 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Silahisabungan, yaitu 4.605 jiwa (1.65%), dengan rata-rata kepadatan penduduk hanya 60.90% jiwa/km<sup>2</sup>.

## **2. Kondisi Keuangan dan Perekonomian Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Dairi adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan

dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah Kabupaten Dairi meliputi : (1). Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2). Dana Perimbangan; (3). dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.<sup>43</sup>

### **3. Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana pembangunan yang berisi rencana pengembangan sektoral dan rencana pengembangan ruang wilayah yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang dapat memberikan kemakmuran kepada masyarakat serta terjaminnya kesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi.

### **4. Kondisi Sosial dan Budaya di Kabupaten Dairi**

#### **a. Fasilitas Pendidikan**

Pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta memperluas wawasan. Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga tanggungjawab masyarakat dan

---

<sup>43</sup> [www.dairikab.go.id](http://www.dairikab.go.id)

keluarga. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar hingga kejenjang menengah dan tinggi.

#### b. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak diwilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kilo sehari, perumahan, kesehatan, pakaian, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Berkurangnya penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi sejak tahun 2006 hingga 2014 cenderung mengalami penurunan, yaitu 48.00 (ribuan) jiwa (17.91%) pada bulan Maret 2006 menjadi 23.35 (ribuan) jiwa (8.40%) pada bulan September 2014, atau dengan penurunan rata-rata sebesar 8.61% pertahun.

Sementara itu, angka garis kemiskinan penduduk Kabupaten Dairi sejak tahun 2006 hingga 2014 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 149.554,- per kapita per bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 255.130,- perkapita perbulan pada tahun 2014, atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6.90% pertahun.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> [www.dairikab.go.id](http://www.dairikab.go.id)

## **5. Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa perangkat daerah kabupaten terdiri dari atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah tersebut ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan factor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berikut adalah dasar hokum pembentukan organisasi perangkat daerah kabupaten Dairi :

1. Peraturan Daerah kabupaten Dairi No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi .

Sesuai dengan dasar hokum pembentukan struktur organisasi perangkat daerah kabupaten Dairi, organisasi perangkat daerah kabupaten Dairi terdiri dari 17 dinas dan 6 lembaga teknis daerah.

# A. Hasil Pilkada Serentak di Kab. Dairi

No	Nama Calon	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Putih	Jumlah Suara Hitam	Jumlah Suara Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam	Jumlah Suara Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam + Tidak Sah + Putih + Hitam	
																			...
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

  

<p>1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan</p> <p>2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan</p> <p>3. Ketua Tim Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>4. Sekretaris Tim Pengawas Pemilihan Umum</p>	<p>5. Ketua Tim Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>6. Sekretaris Tim Pengawas Pemilihan Umum</p>	<p>7. Ketua Tim Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>8. Sekretaris Tim Pengawas Pemilihan Umum</p>	<p>9. Ketua Tim Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>10. Sekretaris Tim Pengawas Pemilihan Umum</p>	<p>11. Ketua Tim Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>12. Sekretaris Tim Pengawas Pemilihan Umum</p>
---	--	--	---	--

No.	Uraian	Klasifikasi		Mata Uang		Kategori		Risiko		Kategori		Kategori		Kategori		Total
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo			
1	Saldo awal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Saldo akhir	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Klasifikasi		Mata Uang		Kategori		Risiko		Kategori		Kategori		Total
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo			
1	Saldo awal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Saldo akhir	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	<b>KANTOR KEKORPORASIAN KEMENTERIAN PERKURANGAN REPUBLIC OF INDONESIA</b>	
		
Kepala Kantor	Kepala Kantor	Kepala Kantor
		
Kepala Kantor	Kepala Kantor	Kepala Kantor

NOVEMBER 1990

PERKAWANAN KAWANAN

NOVEMBER 1990

NO	Uraian Pekerjaan	KANTON			KABUPATEN			KOTA			TOTAL						
		Jumlah	Luas	Volume	Jumlah	Luas	Volume	Jumlah	Luas	Volume	Jumlah	Luas	Volume				
1	... ..	1.750	2.710	2.871	3	4.211	8.221	2.790	4.830	2.790	8.220	2.790	4.830	2.790	4.830	2.790	4.830
2	...	2.637	4.250	5.416	4	5.777	6.510	3.441	6.747	1.692	3.881	3.750	14.023	8.220	13.241	13.241	13.241
3	...	31	60	189	100	140	31	60	76	4	4	4	100	140	120	120	120
4	...	4.277	9.201	11.493	7	22.541	9.923	8.003	8.000	2.423	7.210	6.150	28.077	13.241	13.241	13.241	13.241
5	...	52	50	231	3	111	296	64	104	28	121	84	200	270	301	301	301
6	...	4.664	9.794	11.908	18	29.473	11.124	4.473	8.470	2.872	6.251	5.351	32.941	13.241	13.241	13.241	13.241

KAWANAN KAWANAN KAWANAN

KAWANAN KAWANAN KAWANAN	KAWANAN KAWANAN KAWANAN	KAWANAN KAWANAN KAWANAN
KAWANAN KAWANAN KAWANAN	KAWANAN KAWANAN KAWANAN	KAWANAN KAWANAN KAWANAN

KAWANAN KAWANAN KAWANAN

## BAB IV

### PILKADA SERENTAK 2018 DI KABUPATEN DAIRI

#### A. Strategi apa yang dilakukan pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy Sihombing dalam Pilkada Serentak 2018 di Kab. Dairi ?

Negara Indonesia telah melaksanakan pemilu beberapa kali, setelah masa orde baru berakhir muncullah masa reformasi. Pada masa reformasi lahirlah sistem otonomi daerah yang berarti perlimpahan beberapa wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan pilkada menjadi salah bentuk dari sistem otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia.

Mekanisme pilkada telah mengalami beberapa perkembangan, pertama kali pilkada dilaksanakan dengan sistem tidak berlangsungnya atau perwakilan, mekanisme pemilihannya yaitu diwakili oleh DPRD. Setelah itu bertepatan tahun 2005 pelaksanaan pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan, untuk mewujudkan demokratisasi dan mengembalikan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004.

Dijelaskan pula dalam QS. An-Nisa: 59

فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازُعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آتَيْنَاهَا بِنَا

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۝ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59). Sebagai seorang muslim maka kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemimpin), dalam pembahasan ini maka sebagai seorang muslim harus mengikuti dan mentaati seorang pemimpin yang taat kepada rasul dan taat kepada Allah. Pelaksanaan dalam pilkada dapat mencontoh kepemimpinan rasul dan khalifah empat, dalam pelaksanaan pemilihannya, penyusunan strategi, berkampanye, serta lengkap dengan cara menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, menentukan sebuah keputusan, memberikan sebuah kebijakan, dan bersikap kepada masyarakat sebagai warna Negara yang baik dan sebagai muslim maka wajib untuk mencontoh suri tauladan yang lebih terdahulu.

Sebuah teori menjelaskan Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18 UUD Negeri RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 1984, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.<sup>45</sup>

Pelaksanaan pilkada secara serentak ini merupakan penyempurnaan dari pilkada langsung. Namun untuk mewujudkan pilkada yang dilaksanakan secara serentak seluruh

---

<sup>45</sup> Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Depok : Pustaka Kemang, 2016), h. 54

Indonesia membutuhkan proses yang cukup lama, pemerintah membagi pelaksanaan secara serentak dalam tujuh gelombang untuk mencapai pelaksanaan pelaksanaan pilkada langsung dan serentak seluruh Indonesia, dan telah dilaksanakan gelombang pertama pada 09 Desember 2015, gelombang kedua pada 15 Februari 2017 dan gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Salah satu yang mengikuti pilkada pada gelombang ketiga salah satunya adalah Kab. Dairi, yang memiliki tiga pasangan kandidat. Dari tiga pasangan kandidat tersebut dengan no urut 2 yaitu Bapak Eddy KA Berutu dan Bapak Jimmy AL Sihombing yang memenangkan pemilihan umum kepala daerah 27 Juni 2018 di kabupaten Dairi 86.838 suara. Saat ini Indonesia tidak hanya melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung lima tahu sekali tetapi pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah.

Menurut penulis pelaksanaan pilkada langsung dan serentak merupakan hal yang penting dan strategis untuk memilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten, kredibel, dan berintegritas. Ada beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya pilkada langsung dan serentak yaitu dapat memperkuat efektifitas sistem pemerintahan Indonesia, kedua dalam pembiayaan pelaksanaan pilkada lebih efisien, dan yang ketiga penyelenggaraan pemilu lebih teratata.

Berbagai perubahan tersebut dilakukan hanya untuk mewujudkan harapan rakyat Indonesia dan menjawab demokrasi yang lalu menjadi pertanyaan masyarakat. Perubahan tersebut memang tidak langsung secara instan, namun membutuhkan waktu yang cukup lama dan melalui perdebatan dan musyawarah yang tidak singkat. Perubahan sistem pemilihan ini, menyebabkan dari berbagai pihak harus benar-benar

memilih dan menyusun sebuah strategi dengan baik jika ingin menang dalam pemilihan kepala daerah.

Strategi selalu digunakan semua orang untuk mencapai suatu tujuan dalam segala hal. Begitu juga dalam halnya pemilihan kepala daerah, strategi yang tepat, penyusunan dan pelaksanaan yang tepat akan menghantarkannya kepada sebuah tujuan yang diinginkan. Strategi dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan serta melihat peluang yang ada dilapangan.

Eddy KA Berutu selaku Bupati terpilih Dairi mengatakan :

“Pendekatan, jadi saya lebih pendekatan personal langsung kepada masyarakat, tatap langsung, ya kemudian itu tadi menghadiri kegiatan-kegiatan, kemudian mensupport kegiatan-kegiatan apa saja, keagamaan, olahraga, pembangunan apa saja dan lain-lainnya, yang paling penting kalau saya tatap muka, saya bisa meyempaikan, saya bertemu dengan masyarakat kemudian saya bisa menyampaikan, saya bisa bertemu dengan masyarakat kemudian saya bisa menyampaikan, saya kalau jadi bupati, saya akan membangun ini lho, nah itu, jadi bukan hanya buat spanduk banyak-banyak, temple dimana-mana, tidak seperti itu kalo saya, saya lebih bertatap muka, saya bisa lebih dekat, saya bisa merasakan, kemudian saya bisa tahu apa yang diinginkan masyarakat itu saya lakukan.”<sup>46</sup>

Jimmy AL Sihombing selaku Wakil Bupati Dairi mengatakan :

“Yah itu tadi, yang saya bilang strategi yang sudah kita bangun, kita mapping dulu, apa apa yang jadi tadi, soal karakter, janji-janjinya soal hal-hal lainnya, ya tiga intinya tadi

---

<sup>46</sup> Eddy KA Berutu, Bupati Dairi, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 2 Oktober 2018.

itulah ya, kemudian baru kita kembangkan, nah ternyata masyarakat itu memang kita dekati, kita datang betul dengan baik seorang pemimpin, dan kita tidak mengumbar janji, kemudian apa hal-hal negative lainnya yang selama ini dilakukan oleh dia itu yang kita, kita, kita angkat habis-habisan, kenapa, ini buktinya, itu kita angkat habis-habisan kepada masyarakat, misalnya apa lagi, misalnya kita bicara masalah pendidikan ternyata apa ? angka pendidikan Dairi itu turun, pada waktu awal dia memimpin itu masih besar, karena ditinggalkan oleh pemimpin yang lama. Nah, sekarang anjlok itu, nah ini yang mau kita naikkan lagi, jadi apa yang telah kita dapat, jadi itu yang kita blow up habis-habisan itu”<sup>47</sup>

Keberhasilan dan kegagalan biasanya dipengaruhi dari penyusunan dan pelaksanaan strategi. Sebuah strategi memiliki taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka pendek atau bisa disebut untuk mendapatkan informasi lebih awal sebelum menyusun dan dan melaksanakan sebuah strategi.

Eddy KA Berutu selaku Bupati Dairi mengatakan :

“Jadi, saya memang orang politik sebenarnya sebelum mengikuti pemilihan bupati saya anggota DPRD 5 tahun, periode 2009-2014, jadi sebenarnya secara politik, secara politik Dairi proses perpolitikan di kab. Dairi bagaimana politik di Dairi saya sudah memahami maka beranjak dari sana saya memberanikan diri menjadi salah satu calon bupati, mungkin saya melihat bahwa masih kurangnya pembangunan yang diberikan kepada rakyat kemudian ada beberapa keinginan rakyat yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan dahulu oleh pemimpin dahulu oleh pemimpin dahulu, kemudian banyak harapan-harapan masyarakat tentang infrastruktur yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan lain-lain kesehatan yang lebih baik, sehingga saya fikir

---

<sup>47</sup> Jimmy AL Sihombing, Wakil Bupati Dairi, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 4 Oktober 2018

masyarakat butuh alternative pemimpin yang baru, nah dengan butuh alternative pemimpin, nah saya coba menawarkan diri sebagai bupati Dairi dengan proses yang cukup panjang, dan saya tidak lepas dari pada apa yang saya lakukan tidak lepas dari pada saya melakukan survei, penelitian survei dalam hal ini, untuk beberapa kali selama proses pemilihan-pemilihan bupati, saya sudah melakukan enam atau tujuh kali, saya melakukan survey sehingga saya tahu betul apa yang diinginkan rakyat, apa keinginan rakyat, nah itu yang saya lakukan”<sup>48</sup>

Jimmy AL Sihombing selaku Wakil Bupati mengatakan :

“Gak, yang lebih penting gini, yang pertama kita tahu dulu kelemahan kita itu apa dulu, pertama kelemahan kita yang pasti itu adalah kita belum dikenal satu, yang kedua kita melawan anak dari bupati nah itu kelemahan kita kan, nah dengan cara itu kita merubah, nah setelah itu kita lihat kelebihan kita, kelebihan kita menurut saya, saya berharap, saya adalah anak muda dan mengabdikan untuk tanah kelahiran kab. Dairi. Sedangkan pak bupati itu benar benar politisi senior, jadi ini benar benar kombinasi antara yang tua dengan yang muda hehehe. Kedua kelebihan kita jaringan-jaringan tim sukses kita itu jalan. Yang ketiga apa kelebihan kita itu apa, isu, isu pak inkumben ini banyak gitu, nah itu orang gak suka, jadi kita manfaatkan benar apa yang ada.”<sup>49</sup>

SWOT merupakan salah satu strategi yang pertama kali dilakukan menentukan langkah selanjutnya sebelum pelaksanaan pemilihan. SWOT dilakukan untuk mengetahui keadaan yang ada dilakukan untuk mengetahui keadaan yang ada dilapangan dan mengetahui yang menjadi kelemahan serta kekuatan dari pihak lawan sehingga dapat menyusun strategi selanjutnya yang akan dilakukan.

---

<sup>48</sup> Eddy KA Berutu, Bupati Dairi, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 2 Oktober 2018

<sup>49</sup> Jimmy AL Sihombing, Op. Cit.

Sebuah teori menjelaskan, seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980) membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.” Untuk menetapkan strategi, dapat digunakan *SWOT* sebagai peralatan untuk menganalisis:

S = *Strengths* - Kekuatan-kekuatan yang dimiliki partai

W = *Weakness* – Kelemahan-kelemahan yang ada pada partai

O = *Opportunities* – Peluang peluang yang mungkin bisa diperoleh partai

T = *Threats* – ancaman ancaman yang bisa diterima oleh partai<sup>50</sup>

Jika kita sudah mengetahui kondisi yang ada dilapangan dan mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan, maka akan mempermudah untuk menyusun strategi selanjutnya. Setelah mengetahui hasil dari proses swot yang dilakukan, selanjutnya menyusun sebuah strategi yang biasanya disebut dengan mapping. Mapping dilakukan untuk mengetahui hasil dari strategi yang dilakukan.

Eddy KA Berutu selaku bupati Dairi mengatakan :

“Ya itu tadi, sayaka sudah survey dulu sebelum saya, jadi saya tahu kecamatan ini masyarakatnya ingin seperti ini, kecamatan ini masyarakatnya ingin gitu kan, harapan masyarakat seperti apa nah itu kita, kita buat kita implementasikan pada program-program yang kita janjikan kepada masyarakat.”<sup>51</sup>

Jimmy AL Sihombing selaku Wakil Bupati Dairi mengatakan :

---

<sup>50</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*(Jakarta, Rajawali Pers, 2011),h. 236

<sup>51</sup> Eddy KA Berutu, Op. Cit.

“Sebenarnya strategi yang kita lakukan pertama, mapping yang kita lakukan adalah mapping yang kita lakukan pertama adalah soal masalah, bagaimana sih sebenarnya masalah yang timbul dimasyarakat terhadap pemimpin yang ada, nah itu kita mapping semua, apasih masalahnya, yang pasti itu sudah dapat jawaban sebenarnya satu memang bupati incumbent ini memiliki janji soal jalan tapi banyak jalan yang tidak terealisasi jadi banyak jalan yang tidak baik, kedua bidang pendidikan, ketiga bidang kesehatan dan lain sebagainya jadi itu, itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua apa, yang kita cari lagi apa, adakah janji janji beliau semasa kampanye dulu, misalnya pada kampanye itu janji janji beliau yang terealisasi ataupun yang tidak terealisasi nah kita lihat semua, sudah kita lihat semua, alhamdulillah hasil peninjauannya dari Sembilan apa sebelas janji itu banyak yang tidak terpenuhi malah cenderung tidak ada sama sekali nah, nah itu yang kita pakai. Yang ketiga, gimana sih karakter pemimpin kita sendiri, karakter pemimpin yang ada pada waktu itu terhadap masyarakat, nah itu yang kita lihat. Nah ternyata banyak jawabannya bahwa pemimpin yang ada atau incumbent kita itu, ia merasa dirinya sudah berlebih menjadi seorang pemimpin jadi dia bukan jadi betul betul melayani, kedua adalah merasa dirinya itu karena pemimpin jadinya jadi semau-maunya, nah nah itu, kami masih kecil persentasinya masih 11% kalau tidak salah ee17%, bayangkan saja 17% kita kerja all out habis habisan, isu isu yang kita angkat dan hebatnya lagi ada, masyarakat itu, bapak datang kekami ini yang penting bapak jangan janji-janjilah nah masyarakat gak mau janji-janji pokonya bapak mau ngomong, ngomonglah yang penting jangan janji-janjilah dari situ kami bergerak terus, perlahan-lahan, dari minggu ke minggu, dari minggu keminggu naik terus, ya pelan pelan.”<sup>52</sup>

Pemilihan strategis harus ada hal-hal yang diprioritaskan dalam perang, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyerang strategi lawan, yang kedua adalah

---

<sup>52</sup> Jimmy AL Sihombing, Op. Cit.

menghancurkan aliansi lawan, yang ketiga menghancurkan analisa lawan dan yang keempat menyerang tentara lawan dan yang terakhir yang menduduki kota yang dibentengi lawan. Oleh karena itu pengenalan terhadap pihak lawan adalah sangat penting.

Suatu strategi memang memberikan suatu kemudahan dan sangat membantu dalam segala keadaan jika benar-benar dapat memilih dan menyusun serta melaksanakan strategi tersebut dengan tepat. *Mapping* yang dilakukan sangat mempermudah untuk melihat perkembangan yang terjadi dimasyarakat terhadap yang sudah dilakukan. Sehingga dengan begitu yang menjadi target bisa tercapai dan yang dilakukan pun tidak sia sia. Namun dalam pelaksanaan sebuah strategi tidak luput dari peran penting kerjasama kelompok dalam hal ini biasa disebut dengan Tim Sukses. Keberhasilan dan kegagalan tidak luput dari adanya peran tim sukses, yang bertugas mencari informasi-informasi yang ada dilapangan sehingga penyusunan strategi yang dilakukan tepat.

Eddy KA Berutu selaku Bupati Dairi mengatakan :

“Saya fikir cukup baik ya, kemudian tidak semua saya lakukan sendiri tentu saya butuh tim, butuh rekan, kawan, saudara yak an untuk menyampaikan aspirasi saya kepada masyarakat, kemudian bisa mendekati masyarakat, menjual program-program saya mungkin saya secara globalnya saja kepada masyarakat mungkin detailnya oleh tim-tim saya ini yang menyampaikan kepada masyarakat untuk kita, membantu kita membuat kegiatan-kegiatan, mendekati kita kepada tokoh-tokoh masyarakat, karena tidak semuatokoh masyarakat kita tahu, kita kenal, tapi akibat dari tim kita ini, tim kita dikampung itu kita tahu, kita kenal, tapi akibat dari tim kita ini, tim kita dikampung itu kita tahu, pak kita harus datang kesini, kita harus datang kesitu, itu tokoh masyarakat,



itu tokoh agama, itu tokoh pemuda, saya pikir tim cukup bagus cukup membantu saya dalam hal pemenangan pada saat pemilihan kepala daerah kemariin”<sup>53</sup>

Jimmy AL Sihombing selaku Wakil Bupati Dairi mengatakan :

“Bagus ya, jadi kami itu begini, tim sukses kami itu ada beberapa tingkatan, ada tim yang dipermukaan, itu namanya tim Rumah Perjuangan, Tim Redi, ada tim yang tidak diketahui orang itu namanya tim amd, tim amd ini memang tidak terstruktur, nah ini berhasil, jadi memang dia pengaruhi, isu-isu dikembangkan, terutama tim amd ini dikembangkan dan apa responnya, ya bagus, dia jual kita, dia jelekkan kita, ternyata respon dari masyarakat tidak, sampai segitunya, Ya, ya sangat penting sekali tim sukses ini.”<sup>54</sup>

Tim Sukses biasanya terdiri dari Penasehat, Tim Ahli, Tim Riset, dan Litbang, Tim Pengumpul Dana, Tim Kampanye, Tim Penggalang Masa, Tim Hubungan Antar Daerah, Tim Pengamat (*Intelegent*), Tim Pengaman, dan Tim Pengumpul Suara (*Vote Getter*). Dari beberapa bagian yang disebut dengan tim sukses, maka jalinan ke komunikasi dan kesolidan dalam kerja sangat-sangat diperlukan, setiap bidang yang ada dalam tim sukses sudah pasti memiliki fungsi masing-masing.

#### 1. Penasehat

Penasehat berfungsi memberikan masukan dalam hal strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh partai atau calon dalam mencapai tujuan, seperti memenangkan pemilu dan merangkul pihak pihak yang menentukan pemberian suara. Para penasehat yang ditunjuk pada umumnya punya kematangan dan pengalaman sebagai politisi. Dan mengikuti perkembangan dengan melihat dimensi-dimensi strategic yang tidak dilihat orang lain.

---

<sup>53</sup> Eddy KA Berutu, Op. Cit.

<sup>54</sup> Jimmy AL Sihombing, Op. Cit.

## 2. Tim Ahli

Tim Ahli adalah Kelompok ahli yang diangkat menurut bidangnya. Biasanya tim ahli adalah menyusun program yang akan dibawakan oleh calon, memberikan substansi atau tema, terhadap isi pidato yang akan meyangkut bidang keahliannya. Tim Ahli biasanya terdiri atas : bidang politik, ekonomi dan keuangan, komunikasi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, kebijakan dan kerjasama.

## 3. Tim Riset dan Litbang

Tim Riset dan Litbang adalah kelompok para peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan partai, misalnya persepsi masyarakat terhadap citra partai, pendapat masyarakat terhadap kapabilitas calon yang diusung, peta politik pemilih, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk para kader dalam bidang-bidang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja partai.

## 4. Tim Pengumpul Dana

Bagi yang ingin maju dalam pencalonan jabatan public, serta anggota legislative, presiden dan wakil presiden, gubebernur dan wakil gubernur, bupati/walikota tidak hanya memerlukan banyak waktu, energi dan pendukung, tetapi juga memerlukan dana yang tidak kecil untuk mempromosikan diri, kebijakan dan pikiran-pikirannya. Karena itu, seorang calon atau kandidat memerlukan tim pengumpul data (fund raising) yang mengetahui sumber-sumber dana yang mereka bisa manfaatkan. Biasanya tim pengumpul dana memiliki hubungan yang baik dengan para pengusaha.

## 5. Tim Kampanye

Tim Kampanye adalah mereka yang merencanakan dan menggerakkan kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan partai. Untuk menggerakkan kampanye seharusnya ditunjukkan seorang manajer kampanye yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan dan strategi komunikasi, atau yang memiliki pengetahuan dibidang politik,

tetapi memiliki pengalaman dan hubungan baik dengan media. Seorang manajer kampanye adalah orang yang bukan dicalonkan melainkan mengkoordinir semua langkah dan strategi komunikasi untuk memenangkan calon atau partai yang diusung.

#### 6. Tim Panggalang Massa

Mereka adalah orang-orang yang direkrut untuk menggalang massa, baik untuk kepentingan pengumpulan suara maupun show force untuk menunjukkan kekuatan partai kepada masyarakat dan calon pemilih. Penggalangan massa biasanya dilakukan untuk meningkatkan para pemilih untuk datang ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan.

#### 7. Tim Hubungan Antardaerah

Tim ini merupakan orang-orang yang dipercayakan untuk menangani hubungan antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah dan Cabang yang ada di ibu kota provinsi dan kabupaten. Hubungan ini penting dalam menggerakkan mesin organisasi pada tingkat bawah sehingga hubungan itu tetap terjaga dan berkesinambungan.

#### 8. Tim Pengamat (Intelligent)

Kelompok ini dibentuk untuk mengamati dan mengawasi tindak tanduk lawan politik yang membahayakan citra partai atau calon. Tim intelligent ini biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang kemiliteran dan kepolisian dibidang intel dan penyidikan.

#### 9. Tim Pengamanan

Tim pengamanan sangat penting, terutama untuk memberikan perlindungan keamanan kepada calon yang diusung oleh partai.

#### 10. Tim Pengumpul Suara

Mereka terdiri dari orang-orang yang direkrut karena pengaruhnya yang besar dalam masyarakat. Mereka biasanya memiliki kedudukan sosial ekonomi yang terpandang,

misalnya mantan menteri, gubernur, bupati, pemilik tanah pertanian yang banyak memiliki pekerjaan yang banyak, pengusaha nelayan, dan pelayaran yang punya anak kapal, imam desa dan tokoh-tokoh adat yang disegani oleh masyarakat karena memiliki charisma. Para tokoh masyarakat ini digalang oleh partai politik untuk menjadi pengumpul suara karena pengaruhnya.

Arih Y Bancin selaku tim sukses mengatakan :

“Ya, kalau kami sebagai tim sukses kami selalu melakukan survei, kepada masyarakat, nah apa yang kami dapatkan, kami sampaikan kepada tim kami, yah yang pastinya selalu menjalin kerjasama dan komunikasi antar tim ya. Tidak hanya tim yang dibawa saja harus terjalin komunikasi yang baik.”<sup>55</sup>

Kerjasama yang solid dan jalinan komunikasi yang sehingga dalam penyusunan serta pelaksanaan strategi tepat maka hasilnya pun akan sesuai dengan yang diinginkan. Terlihat dari hasil pemilihan Pilkada 27 Juni 2018 pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy AL Sihombing menang dengan jumlah suara 86.838 suara.

Eddy KA Berutu selaku Bupati Dairi mengatakan :

“Ya terimakasih kepada seluruh masyarakat Dairi yang telah memberikan amanah ini kepada saya, mungkin apa yang saya tawarkan kepada rakyat, tentang bagaimana kesehatan misalnya rumah sakit itu baik, bagaimana membuat pemerintahan ini bersih, bagaimana pemerintahan itu baik kan, mungkin apa yang tawarkan kepada masyarakat itu disambut baik oleh masyarakat, dan ternyata itulah yang diharapkan masyarakat oleh karena itu mungkin itu salah satu factor kenapa saya menjadi dipilih oleh masyarakat.”<sup>56</sup>

Jimmy AL Sihombing selaku Wakil Bupati Dairi mengatakan :

---

<sup>55</sup> Arih Y Bancin, Tim Sukses Pasangan Eddy KA Berutu Jimmy AL Sihombing, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 7 Oktober 2018

<sup>56</sup> Eddy KA Berutu, Op. Cit.

“Terimakasih kepada seluruh tim, relawan, sahabat, tokoh masyarakat, pemuka agama dan terkhusus masyarakat Dairi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, berhasil semua gitukan jadi kita punya peluang semua, peluang kita bagus, peluang kita adalah yang paling pasti kita itu isu isu yang ada dimasyarakat itu kita ambil semua, apa kekurangan beliau itu kita angkat habis-habisan dan semuanya positif.”<sup>57</sup>

Wawancara diatas dengan Bupati dan Wakil Bupati menjelaskan bahwa keberhasilan yang mereka capai tidak serta merta berhasil namun harus melewati sebuah proses yang cukup panjang dan tidak terlepas dari hasil kerjasama yang baik antar tim serta menjaga kesolidan dalam sebuah tim.

Akan tetapi jika dilihat dari hasil wawancar tersebut sekilas terlihat bahwa pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy AL Sihombing ini melakukan patologi politik yaitu segala gejala penyakit dalam sistem politik yang mengakibatkan terjadinya dampak pada sistem birokrasi. Pengangkatan isu-isu lawan yang disebarakan oleh tim bapak Eddy KA Berutu dan Jimmy AL Sihombing adalah salah satu bagian dari yang disusun oleh tim, namun pengangkatan isu-isu lawan ini bisa terjadi *Black Campaign* dalam etika politik ini menjadi suatu pelanggaran karena *Black Campaign* adalah suatu perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan seseorang calon atau kelompok dengan memfitnah, menghasut, menghina bahkan mengadu domba dengan meyebarkan berita bohong tentang tim lawan. Sesuai dengan ajaran Islam yang melarang melakukan fitnah karena fitnah itu sangatlah berbahaya, sebuah ayat menerangkan yang artinya “Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.” (Q.S Al-Baqarah : 191)

---

<sup>57</sup> Jimmy AL Sihombing, Op. Cit.

Hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang memberikan suaranya kepada pasangan bapak Eddy KA Berutu dan bapak Jimmy AL Sihombing ini, bukan karena tergiur oleh janji-janji calon, bukan juga terpengaruh karena isu-isu lawan yang diangkat, akan tetapi karena fakta yang mereka rasakan, pembangunan jalan yang tidak merata, kesulitan dalam mengikuti aturan dalam pendidikan yang terlalu sering berubah-ubah seragam akibatnya membingungkan para wali murid. Menurut peneliti tidak terjadi *Black Campaign* dalam pengangkatan dan penyebaran isu-isu lawan karena antara hasil wawancara peneliti dengan *informan* dan *responden* terdapat kesesuaian. Isu-isu yang diangkat terhadap lawan merupakan suatu kebenaran yang apa adanya yang terjadi pada lawan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Strategi yang dilakukan oleh pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy AL Sihombing dalam pilkada serentak 2018 di kabupaten Dairi yang pertama dilakukan adalah survey lapangan, melihat kondisi lapangan yang terjadi, mencari tahu kelemahan dan kekuatan lawan serta peluang yang bisa dimanfaatkan. Kedua mengembangkan isu-isu yang ada, mengblow up isu-isu kelemahan lawan. Ketiga pendekatan kepada masyarakat dengan terjun langsung, bertatap muka dengan masyarakat, sehingga benar-benar memahami yang menjadi keinginan masyarakat. Keempat menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang baik antar tim dan menjaga ke solid an tim. Namun dalam semua strategi yang dilakukan tidak lepas dari pemilihan strategi dan penyusunan serta pelaksanaan yang tepat dan baik sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Karena jika dalam pelaksanaan strategi tersebut tidak tepat dan benar dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam etika politik. Teori *swot* yang digunakan dengan strategi yang dilakukan oleh pasangan Eddy KA Berutu dan Jimmy AL Sihombing yang menggunakan *swot* dalam strateginya, berdasarkan hasil wawancara menemukan kesesuaian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, sebagai penutup dalam skripsi ini diajukan saran saran sebagai berikut :

1. Kepada bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi, agar tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat, tetap mendengarkan keinginan masyarakat, lakukan yang telah menjadi seorang pemimpin yang selalu melayani masyarakatnya yang mendengarkan masyarakatnya, dekat dengan masyarakat. Pembangunan jalan hendaknya diawasi juga oleh pemerintah agar pembangunan jalan dikabupaten Dairi benar-benar merata dan baik. Serta pendidikan dan kesehatan lebih menjadi perhatian pemerintah.
2. Kepada masyarakat saling menjaga kerjasama dengan pemerintah untuk mengawasi kinerja dari pemerintahan kab. Dairi agar kab. Dairi menjadi lebih baik dan lebih maju dalam segi infrastrukturnya maupun dlam pemerintahannya.
3. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti lain diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan wilayah yang berbeda dan lebih luas lagi.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Arifin Anwar, "*Komunikasi Politik : Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*", Jakarta : PT Balai Pustaka, 2013
- Wirawan, "*Kepemimpinan*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
- Husein Umar, "*Strategi Management In Action*", Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset Sosial*", Bandung : Mandar Maju, 1996
- Hadar Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", Yogyakarta : Gema Press, 1987
- M.Iqbal Hasan, "*Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*", Bogor, Ghalia Indonesia, 2002
- Lexy, J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.
- Sutrisno Hadi, "*Metode Research Jilid I*", Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1993
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*(Jakarta, Rajawali Pers, 2011
- Abd. Halim, *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Modal dan Panggung)*, (Yogyakarta, LP2B; 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2007
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2010)
- Irtanto, *Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar; 2008)
- Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta,

PT Mizan Publika, 2016)

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta:2011)

Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Depok, Pustaka Kemang, 2016

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008),

Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

## **B. Dokumentasi**

Sumber : [www.dairikab.go.id](http://www.dairikab.go.id)

Sumber : Arsip Kabupaten Dairi, 2018

Sumber : Data KPU Kab. Dairi 2018